

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) Mengatasi Kesenjangan Gender yang Terjadi

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Di daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM. salah satunya adalah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi pemerintah daerah SPM dapat	Akses Terbatasnya akses (daya capai yang rendah) sumber air baku bagi masyarakat terutama kaum perempuan dan anak-anak Terbatasnya informasi bagi masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan bangunan penampung air Mandiat : Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Di daerah	Terbatasnya ketersediaan bangunan penampung air terutama utk keperluan domestik pada musim kemarau Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak dalam pengelolaan dan pemeliharaan bangunan penampung air Pemerintah kurang menyadari potensi SDM	Pada Umumnya masyarakat menganggap bahwa perencanaan, penentuan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan bangunan penampung air adalah semata-mata urusan pemerintah 1. Kurangnya pengetahuan di masyarakat terutama di kelompok perempuan pengelolaan dan pemeliharaan bangunan penampung air	Terbangunnya SPAM Dengan melibatkan masyarakat terutama perempuan dalam pengelolaan dan pemantauan bangunan penampung air	Melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan SPAM dengan melibatkan kelompok perempuan Melakukan sosialisasi tentang perlunya masyarakat (termasuk kelompok perempuan dan anak) untuk mengelola dan memelihara bangunan penampung air - Mengembangkan kelompok pengguna air untuk lebih banyak melibatkan kelompok perempuan (kesetaraan gender) Melakukan	Persentase Akses air minum layak bagi masyarakat dan 58,62 % di Tahun 2018 menjadi 59,00 pada Tahun 2020	Output : Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat Dengan pembangunan yang responsive gender Outcome : Akses Air Minum Layak Dengan pembangunan yang responsive gender

Tujuan Peningkatnya Penyediaan air minum layak	dijadikan sebagai tolok ukur (benchmark) dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT-M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten:Kolda Partisipasi - Kurangnya peluang atau kesempatan bagi kelompok perempuan untuk menyampaikan informasi untuk penentuan lokasi keterlibatan dalam pemeliharaan dan pengelolaan bangunan penampung air Kontrol: - Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di awasi Pimpinan:Dinas PUPR	(terutama perempuan dan anak-anak di lokasi setempat yang bias memberikan masukan dan dilibatkan dalam proses penentuan lokasi/pemeliharaan dan pengelolaan bangunan penampung air			identifikasi item pekerjaan yang memungkinkan partisipasi perempuan di dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan bangunan penampung air Melaksanakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat terutama kelompok perempuan pada pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perempuan dan partisipasinya dalam pengelolaan dan pemeliharaan bangunan penampung air		
---	---	---	---	--	--	---	--	--

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Dharmasraya terdiri atas: a. pemenuhan kebutuhan pokok as. minum sehari-hari; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik							
---	--	--	--	--	--	--	--

Pukul Pening April 2021
KEPALA DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DHARMASRAYA



Ir. JUNAR HUNUS
NIP. 19630929 199203 1 003

Tim Verifikasi

Inspektur  Kandari S. Sani NIP. 19670607 199103 1 004	KEPALA BAPPEDA  Dr. S. Sani NIP. 19670607 199103 1 004	Kepala Bappeda  Dr. And Sumanto, CPA NIP. 19641220 196009 1 001	Kepala Dinas Sosial P3APPKB  Dr. M. S. I NIP. 19641220 196009 1 001
---	---	---	---

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TAHUN ANGGARAN	: 2021
PROGRAM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum
KODE PROGRAM	1.03.03
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Di daerah Kabupaten/Kota
HASIL/OUTPUT	Terbangunnya SPAM Dengan melibatkan masyarakat terutama perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bangunan penampung air
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur (<i>benchmark</i>) dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten Kabupaten Dharmasraya terdiri atas : a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. 5. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses Terbatasnya akses (daya capai yang rendah) sumber air baku bagi masyarakat terutama kaum perempuan dan anak-anak

Manfaat :

Meningkatnya penguasaan gender dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) Di daerah

Partisipasi

Kurang nya peluang atau kesempatan bagi kelompok perempuan untuk penyampaian informasi untuk penentuan lokasi keterlibatan dalam pemeliharaan dan pengelolaan bangunan penampung air

Kontrol:

Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di awasi Pimpinan/Dinas PUPR

b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4)

Terbatasnya ketersediaan bangunan penampung air terutama utk keperluan domestic pada musim kemarau

6. Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak dalam pengelolaan dan pemeliharaan bangunan penampung air
7. Pemerintah kurang menyadari potensi SDM (terutama perempuan dan anak-anak di lokasi setempat yang bias memberikan masukan dan dilibatkan dalam proses penentuan lokasi/pemeliharaan dan pengelolaan bangunan penampung air

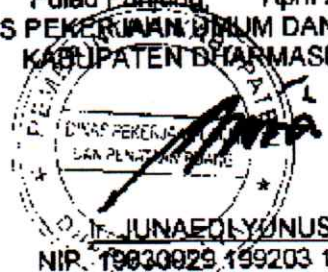
c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP

Pada Umum asyarakat menganggap bahwa perencanaan, penentuan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan bangunan penampung air adalah semata-mata adalah urusan pemerintah
Kurangnya pengetahuan di masyarakat terutama di kelompok perempuan pengelolaan dan pemeliharaan bangunan penampung air

RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	- Melakukan sosialisasi tentang rencana Pembangunan SPAM dengan melibatkan kelompok perempuan - Melakukan sosialisasi tentang perlunya masyarakat (termasuk kelompok perempuan dan anak untuk mengelola dan memelihara bangunan penampung air - Mengembangkan kelompok pengguna air untuk lebih banyak melibatkan kelompok perempuan (kesetaraan gender) - Melakukan identifikasi item pekerjaan yang memungkinkan partisipasi perempuan di dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan bangunan penampung air Melaksanakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat terutama kelompok perempuan pada pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perempuan dan partisipasi nya dalam pengelolaan dan pemeliharaan bangunan penampung air		
		<table><tr><td>Tujuan</td><td>Tertaksananya Peningkatan jaringan perpipaan SPAM Perdesaan 25 lokasi</td></tr></table>	Tujuan	Tertaksananya Peningkatan jaringan perpipaan SPAM Perdesaan 25 lokasi
Tujuan	Tertaksananya Peningkatan jaringan perpipaan SPAM Perdesaan 25 lokasi			

		masyarakat 1000 Rumah Tangga
	Alokasi Anggaran	8.350.317.000,-
	Total anggaran	8.350.317.000,-
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Output : Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat Dengan pembangunan yang responsive gender Outcome : Akses Air Minum Layak Dengan pembangunan yang responsive gender	

Pulau Pungung, April 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DHARMASRAYA



Tim Verifikasi

Inspektur <u>Kadam, S.Sos</u> NIP. 19670807 199103 1 004	Kepala BKD <u>Paryanto, S.Sos.MT</u> NIP. 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Bappeda R3APPKB <u>Hedy P. Prada, S. Si M. Si</u> NIP. 19820521 200012 1 002
---	--	---	--

Urusan	Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar					
Unit Organisasi	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Sub Unit Organisasi	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Program	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan air Minum				
Kegiatan	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/kota				
Sub Kegiatan	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan pedesaan				
Sumber Pendanaan		APBD				
Lokasi Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2021				
Kelompok Sasaran						
Jumlah 2021		Rp. 8.350.317.000,-				
Jumlah 2022						
Jumlah 2023						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Meningkatnya akses air minum layak bagi masyarakat				60 %	
Masukan	Terlaksananya Peningkatan jaringan perpipaan SPAM Perdesaan				25 lokasi	
Keluaran Hasil	Tersedianya akses air minum layak bagi masyarakat				1.000 Rumah Tangga	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PP N	Jumlah

Pulau Pinang, April 2021
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN DHARMASRAYA


 Ir. JUNAEDI YUNUS

NIP. 19630929 199203 1 003